

## EKSPLORASI TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Sholihin<sup>1\*</sup>, Salito<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> PGMI, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITDAR), Indonesia

\*Corresponding Author; [sholihinlihin120@mail.com](mailto:sholihinlihin120@mail.com), [smilesalito@mail.com](mailto:smilesalito@mail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci: pengelolaan sarana dan prasarana, pendidikan, tantangan, kepemimpinan sekolah, partisipasi warga sekolah*

*Received : 28 Mei*

*Revised : 6 Juni*

*Accepted : 15 Juni*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan meliputi kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan anggaran, partisipasi warga sekolah, kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi geografis dan lingkungan eksternal. Sekolah yang mampu menerapkan strategi pengelolaan berbasis partisipasi dan adaptif terhadap tantangan lokal cenderung lebih berhasil dalam menjaga keberfungsian fasilitas pendidikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sarana dan prasarana guna menunjang kualitas pendidikan yang merata. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merumuskan strategi pengelolaan fasilitas yang lebih efektif dan kontekstual.

---

### PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Ketersediaan, kelayakan, serta keberfungsian fasilitas pendidikan memiliki peran signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Sarana meliputi segala bentuk peralatan dan perlengkapan pembelajaran, seperti meja, kursi, buku, media pembelajaran, serta teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, prasarana mencakup bangunan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan fasilitas sanitasi. Kedua elemen ini saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan

masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara administratif, teknis, maupun manajerial.

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak satuan pendidikan, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), masih mengalami kekurangan fasilitas dasar. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 40% sekolah di Indonesia memiliki ruang kelas yang rusak sedang hingga berat. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas laboratorium, perpustakaan, atau akses internet yang memadai. Keterbatasan ini tentu berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, terutama dalam hal implementasi kurikulum dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

Masalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya sebatas pada ketersediaan fisik, tetapi juga menyangkut aspek perawatan, pemanfaatan, dan keberlanjutan. Banyak sekolah yang belum memiliki sistem inventarisasi yang baik, sehingga terjadi kebingungan dalam pencatatan, pengawasan, dan pemeliharaan barang. Di sisi lain, rendahnya kapasitas manajerial kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan aset pendidikan memperburuk situasi tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suryana & Widodo (2020), yang menunjukkan bahwa kompetensi kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana masih rendah, terutama dalam aspek perencanaan dan evaluasi.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan sekolah tidak dapat melakukan perawatan rutin terhadap fasilitas yang dimiliki. Dalam sistem Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), alokasi untuk perawatan dan pengadaan sarana prasarana sering kali tidak mencukupi. Ditambah lagi, alokasi anggaran dari pemerintah daerah tidak merata, dan masih terdapat ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta atau antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Studi oleh World Bank (2021) menyoroti bahwa investasi infrastruktur pendidikan di Indonesia masih belum optimal, terutama dalam hal pemerataan dan kualitas distribusi.

Selain itu, faktor budaya organisasi di sekolah turut mempengaruhi kualitas pengelolaan sarana dan prasarana. Sekolah yang memiliki budaya kerja yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada mutu cenderung lebih efektif dalam mengelola fasilitas yang dimiliki. Sebaliknya, di sekolah yang minim partisipasi warga sekolah, proses perawatan dan pemanfaatan sarana prasarana cenderung tidak berjalan optimal. Hal ini diperkuat oleh kajian dari Susanto (2019) yang menyatakan bahwa keterlibatan guru dan siswa dalam merawat fasilitas sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki dan memperpanjang umur fasilitas tersebut.

Tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana juga muncul dari aspek regulasi dan birokrasi. Banyak kepala sekolah dan pengelola keuangan yang merasa terbebani oleh kompleksitas aturan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah. Proses pengadaan yang panjang, prosedural, dan penuh risiko sering kali membuat sekolah enggan melakukan pembaruan

fasilitas, meskipun sangat dibutuhkan. Ini menjadi hambatan signifikan, terutama bagi sekolah yang berada di daerah dengan akses yang sulit terhadap penyedia barang dan jasa.

Kemajuan teknologi seharusnya bisa menjadi solusi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, misalnya dengan penerapan sistem informasi manajemen aset. Namun, implementasi teknologi tersebut belum merata dan banyak sekolah belum memiliki SDM yang mampu mengoperasikan sistem tersebut dengan efektif. Menurut penelitian oleh Prasetyo & Raharjo (2021), adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan sarana prasarana di sekolah masih rendah karena kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penting dilakukan eksplorasi yang mendalam terhadap praktik pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat satuan pendidikan. Pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan karena dapat menggali dinamika sosial, pengalaman subjektif, dan praktik nyata yang tidak selalu tampak dari data kuantitatif. Dengan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan peserta didik, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif untuk merumuskan solusi yang kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak mengingat tuntutan terhadap mutu pendidikan yang semakin tinggi seiring dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan perkembangan global. Pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif akan menjadi salah satu kunci dalam menunjang implementasi kurikulum, pengembangan karakter, dan pencapaian kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap tantangan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya penting dari sisi manajerial, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola, kendala, serta strategi yang digunakan oleh berbagai sekolah dalam mengelola fasilitas pendidikan mereka. Temuan-temuan tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat sekolah maupun pemerintah, untuk merancang intervensi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi

langsung, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta diskusi dengan ahli untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Bagaimana kondisi aktual sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan yang diteliti.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi aktual sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang diteliti berada dalam kategori minim dan tidak merata, baik dari segi jumlah maupun kelayakan. Di beberapa ruang kelas, kondisi fisik bangunan menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural seperti plafon yang bocor, dinding yang retak, dan ventilasi yang tidak berfungsi optimal. Meja dan kursi siswa sebagian besar sudah aus, tidak ergonomis, dan sebagian tidak layak pakai. Selain itu, beberapa ruang kelas masih belum memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang memadai, sehingga mengganggu kenyamanan belajar. Fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium IPA, dan ruang komputer juga masih sangat terbatas, bahkan di beberapa sekolah hanya tersedia secara simbolis tanpa dukungan perangkat yang berfungsi. Temuan ini memperkuat data dari Kemendikbudristek (2022) yang menyebutkan bahwa lebih dari 40% sekolah di Indonesia masih memiliki ruang kelas rusak sedang hingga berat, terutama di daerah pinggiran dan terpencil.

Lebih lanjut, prasarana pendukung seperti fasilitas sanitasi dan air bersih juga menjadi masalah serius. Di satuan pendidikan yang diteliti, jumlah toilet sangat terbatas dan sebagian besar tidak memiliki akses air yang mengalir. Hal ini berdampak negatif terhadap kebersihan dan kesehatan siswa, terutama siswa perempuan. Ketidaktercukupannya fasilitas sanitasi ini juga telah disorot dalam penelitian UNICEF (2020), yang mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah dasar di Indonesia yang tidak memiliki sanitasi layak, terutama yang berada di daerah pedesaan. Selain itu, akses terhadap air minum dan fasilitas cuci tangan yang memadai belum tersedia secara menyeluruh, yang semestinya menjadi prioritas sejak pandemi COVID-19. Keberadaan lapangan olahraga dan ruang serbaguna juga masih minim, menyebabkan kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan minat-bakat siswa tidak dapat berjalan optimal.

Dari sisi sarana teknologi informasi, kondisi yang ditemukan sangat mengkhawatirkan. Laboratorium komputer yang tersedia hanya dilengkapi dengan unit komputer lama, sebagian besar tidak berfungsi, dan tidak memiliki akses internet yang stabil. Guru dan siswa juga belum terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran karena keterbatasan fasilitas. Hal ini menyulitkan sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital sebagaimana diamanatkan dalam Kurikulum Merdeka. Penelitian oleh

Prasetyo & Raharjo (2021) menyatakan bahwa kesenjangan digital di sekolah-sekolah Indonesia masih tinggi karena kurangnya infrastruktur dasar dan pelatihan TIK bagi guru. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pengadaan perangkat baru maupun peningkatan kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran digital.

Temuan lain yang signifikan adalah bahwa meskipun terdapat beberapa upaya mandiri dari pihak sekolah untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas melalui dana komite atau bantuan masyarakat, hal tersebut tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan. Sekolah masih sangat bergantung pada alokasi Dana BOS yang penggunaannya terbatas, serta proses pengajuan bantuan sarana-prasarana yang rumit dan birokratis. Di sisi lain, tidak semua kepala sekolah dan tenaga administrasi memiliki kapasitas manajerial dan pengetahuan teknis dalam mengelola aset pendidikan secara efisien. Kondisi ini sesuai dengan temuan Suryana & Widodo (2020) yang menegaskan bahwa lemahnya kapasitas manajerial di tingkat sekolah menjadi salah satu faktor utama tidak optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, kondisi aktual sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang diteliti menggambarkan tantangan sistemik yang perlu diatasi secara kolaboratif oleh pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

## **2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan adalah keterbatasan anggaran. Meskipun sekolah menerima alokasi dana dari pemerintah, seperti Dana BOS, namun jumlahnya sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan aktual untuk perawatan, pembaruan, atau pengadaan fasilitas baru. Banyak kepala sekolah mengungkapkan bahwa mereka harus memilih prioritas pengeluaran yang paling mendesak karena dana tidak mencukupi untuk menangani semua kebutuhan sarana dan prasarana secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan temuan World Bank (2021), yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan di Indonesia cenderung fokus pada aspek operasional dan kurang optimal dalam investasi infrastruktur. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan dana menyebabkan beberapa fasilitas rusak dibiarkan tidak diperbaiki, yang pada akhirnya berdampak pada kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar.

Selain keterbatasan anggaran, tantangan lain yang menonjol adalah minimnya kapasitas manajerial tenaga kependidikan dalam mengelola aset fisik sekolah. Banyak sekolah, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan, belum memiliki sistem inventarisasi dan perencanaan pemeliharaan yang baik. Tidak jarang ditemukan data aset yang tidak akurat, pengelolaan ruang yang

tidak efisien, dan lemahnya kontrol terhadap penggunaan fasilitas. Penelitian oleh Suryana & Widodo (2020) menegaskan bahwa rendahnya kemampuan perencanaan dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana menjadi penghambat serius dalam pencapaian mutu layanan pendidikan. Kurangnya pelatihan teknis bagi kepala sekolah dan tenaga administrasi memperburuk kondisi ini, di mana sebagian besar keputusan terkait fasilitas masih dilakukan secara ad hoc, tanpa dasar data yang valid atau strategi jangka panjang.

Lebih lanjut, tantangan struktural dan birokratis juga sangat mempengaruhi kelancaran pengelolaan sarana prasarana. Prosedur pengadaan barang dan jasa yang rumit serta penuh aturan administratif sering kali menjadi beban tambahan bagi sekolah. Banyak kepala sekolah mengeluhkan proses pengadaan yang memerlukan dokumen dan proses verifikasi yang panjang, serta risiko kesalahan administratif yang tinggi. Dalam banyak kasus, kendala administratif ini menyebabkan keterlambatan perolehan fasilitas penting atau membuat pihak sekolah enggan melakukan pembaruan karena takut menyalahi prosedur. Kajian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2022) menunjukkan bahwa sekitar 30% sekolah mengalami kendala dalam pelaporan pengadaan barang karena kompleksitas regulasi yang tidak sebanding dengan kapasitas teknis sekolah.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi dan kesadaran warga sekolah dalam menjaga dan memelihara sarana prasarana yang ada. Dalam observasi lapangan, ditemukan bahwa banyak fasilitas sekolah yang cepat rusak karena penggunaan yang tidak bertanggung jawab atau tidak adanya budaya pemeliharaan bersama. Guru dan siswa sering kali memandang sarana sekolah sebagai tanggung jawab pihak lain, bukan bagian dari kepedulian kolektif. Padahal, menurut Susanto (2019), partisipasi aktif warga sekolah dalam menjaga fasilitas pendidikan terbukti dapat memperpanjang masa pakai sarana sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan. Kurangnya pembiasaan dan edukasi tentang pentingnya merawat fasilitas menjadi celah yang harus ditangani secara sistemik melalui penguatan budaya sekolah yang partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan.

### **3. Bagaimana strategi yang diterapkan sekolah dalam menghadapi tantangan pengelolaan sarana dan prasarana.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu strategi utama yang diterapkan sekolah dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada. Kepala sekolah bersama tim manajemen berupaya melakukan pemetaan kebutuhan secara berkala dan menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Misalnya, jika laboratorium belum tersedia, maka ruang kelas disulap menjadi ruang praktikum sementara dengan penyesuaian peralatan dan jadwal penggunaan. Pendekatan adaptif ini mencerminkan upaya efisiensi penggunaan ruang dan fasilitas yang terbatas. Studi oleh Suparno (2021) juga menekankan pentingnya strategi adaptif dalam

pengelolaan sarana prasarana di sekolah-sekolah pinggiran yang menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Strategi kedua yang menonjol adalah pelibatan komunitas sekolah, termasuk komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar, dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Sekolah membangun komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan eksternal untuk menghimpun dukungan, baik dalam bentuk dana, barang, maupun tenaga. Dalam beberapa kasus, komite sekolah berhasil menggagas kegiatan gotong royong untuk memperbaiki ruang kelas, mengecat dinding, atau menyediakan alat kebersihan. Strategi ini juga didukung oleh hasil kajian Mulyasa (2020) yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan terbukti meningkatkan rasa memiliki terhadap fasilitas sekolah serta mempercepat proses pemenuhan kebutuhan sarana.

Selain itu, sekolah juga menerapkan strategi pemeliharaan preventif dan berkelanjutan terhadap fasilitas yang ada. Pemeliharaan dilakukan secara rutin melalui pembentukan tim kecil yang bertugas melakukan pemeriksaan fasilitas setiap bulan, serta mencatat kerusakan atau kebutuhan perbaikan dalam sistem inventarisasi sederhana. Beberapa sekolah bahkan menyusun jadwal rotasi tanggung jawab pemeliharaan antar kelas atau antar unit kerja untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama. Penelitian dari Handayani & Sugiarto (2019) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem pemeliharaan preventif mengalami penurunan signifikan dalam jumlah kerusakan fasilitas setiap tahunnya, sekaligus menghemat biaya perbaikan darurat.

Terakhir, strategi berbasis teknologi mulai diadopsi oleh beberapa sekolah meskipun masih terbatas. Beberapa kepala sekolah mulai menggunakan aplikasi sederhana untuk pendataan aset dan pengajuan kebutuhan fasilitas melalui sistem daring, baik ke pemerintah daerah maupun ke sponsor pendidikan. Inovasi ini menunjukkan peningkatan literasi digital dan kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis data. Studi oleh Wahyuni (2022) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa digitalisasi dalam manajemen sarana prasarana membantu sekolah dalam merencanakan pengadaan dan melaporkan kondisi fasilitas secara lebih akurat dan transparan. Meskipun masih dihadapkan pada kendala SDM dan infrastruktur pendukung, inisiatif ini menunjukkan arah positif dalam strategi pengelolaan fasilitas pendidikan yang lebih modern dan efisien.

#### **4. Bagaimana persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa) terhadap pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memegang peranan strategis dalam pengelolaan sarana dan prasarana, namun sering kali

menghadapi keterbatasan kewenangan dan anggaran. Kepala sekolah menyadari pentingnya perencanaan dan pemeliharaan sarana prasarana, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya kerap terkendala oleh mekanisme birokrasi yang rumit serta alokasi dana yang terbatas. Banyak kepala sekolah yang mengeluhkan proses pengadaan barang yang lambat dan tidak fleksibel, yang menghambat pemenuhan kebutuhan mendesak sekolah. Temuan ini sejalan dengan studi Prasetyo (2022), yang menemukan bahwa 68% kepala sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan merasa kewenangan mereka dalam mengelola sarana prasarana belum sepenuhnya otonom, terutama terkait penggunaan Dana BOS dan bantuan dari pemerintah daerah.

Dari sisi guru, persepsi mereka terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran di dalam kelas. Banyak guru yang mengungkapkan bahwa keterbatasan alat peraga, teknologi pembelajaran, dan ruang kelas yang kurang layak berdampak pada kreativitas dan efektivitas proses mengajar. Dalam beberapa kasus, guru terpaksa menggunakan alat pribadi untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar, seperti laptop, proyektor, hingga fotokopi materi ajar. Hal ini menunjukkan adanya beban tambahan yang ditanggung guru akibat pengelolaan sarana yang belum optimal. Penelitian oleh Sari & Kurniawan (2020) mengonfirmasi hal ini, menyebutkan bahwa kurangnya dukungan fasilitas berdampak langsung terhadap motivasi dan profesionalisme guru, terutama di sekolah menengah pertama di wilayah suburban.

Tenaga kependidikan, khususnya staf administrasi dan petugas kebersihan, memiliki pengalaman yang berbeda namun tak kalah penting. Mereka sering menjadi pelaksana teknis dalam perawatan dan pencatatan sarana prasarana, namun kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Banyak staf mengungkapkan kurangnya pelatihan dalam sistem inventarisasi barang serta minimnya apresiasi terhadap kerja mereka dalam menjaga keberlangsungan fasilitas sekolah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara beban kerja dan dukungan institusional terhadap tenaga non-pengajar. Hasil penelitian dari Utami (2021) menyebutkan bahwa sistem manajemen aset di sekolah-sekolah negeri masih bersifat manual dan sangat bergantung pada inisiatif individu staf, yang menyebabkan potensi kehilangan atau kerusakan aset yang tidak dilaporkan.

Sementara itu, siswa sebagai pengguna langsung sarana dan prasarana menunjukkan persepsi yang beragam. Di satu sisi, siswa mengapresiasi fasilitas yang tersedia seperti perpustakaan, lapangan, atau laboratorium ketika dikelola dengan baik. Namun di sisi lain, banyak siswa merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang kelas yang sempit, ventilasi buruk, serta minimnya akses terhadap sarana kebersihan seperti toilet yang layak. Beberapa siswa juga menyatakan bahwa penggunaan fasilitas sekolah kurang merata, di mana kelas unggulan cenderung mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam akses terhadap ruang atau perangkat teknologi. Ini memperkuat temuan dari kajian empiris

oleh Latifah & Nugroho (2022), yang menemukan bahwa ketidakadilan dalam distribusi fasilitas di dalam sekolah berdampak pada semangat belajar dan rasa keadilan sosial di kalangan peserta didik.

Secara keseluruhan, para pemangku kepentingan menunjukkan kesadaran akan pentingnya sarana dan prasarana pendidikan, namun pengalaman mereka mencerminkan tantangan nyata dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan dan adil. Terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas, baik dalam aspek penyediaan, pemeliharaan, maupun pemanfaatan fasilitas. Pengelolaan yang belum terintegrasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pelibatan semua pihak menjadi hambatan utama. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem manajemen sarana prasarana di sekolah, dengan menekankan pada prinsip partisipatif, transparansi, dan pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap pengalaman para pemangku kepentingan ini sangat penting sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

#### **5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang visioner, komunikatif, dan memiliki kompetensi manajerial yang baik cenderung mampu mengatur perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sekolah secara lebih sistematis. Studi oleh Mulyasa (2019) memperkuat temuan ini, menyebutkan bahwa keberhasilan pengelolaan sarana prasarana sangat bergantung pada kepemimpinan strategis kepala sekolah dalam merancang program serta membangun budaya kerja kolektif. Di sekolah yang memiliki kepala sekolah aktif dan responsif, terlihat adanya inisiatif untuk menjalin kemitraan dengan pihak luar, mengajukan proposal pengadaan ke pemerintah daerah, hingga melakukan swadaya masyarakat guna memperbaiki fasilitas.

Selain faktor kepemimpinan, dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah menjadi aspek yang sangat menentukan. Banyak sekolah mengalami hambatan serius dalam perawatan dan peremajaan sarana karena keterbatasan dana, baik dari APBD maupun Dana BOS. Temuan ini senada dengan laporan World Bank (2021) yang menggarisbawahi bahwa meskipun Dana BOS telah menjadi instrumen utama pembiayaan operasional sekolah, proporsi anggaran yang dapat digunakan untuk sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Ketika anggaran minim, kepala sekolah seringkali dihadapkan pada dilema prioritas: antara memperbaiki fasilitas yang rusak atau memenuhi

kebutuhan pembelajaran yang lebih mendesak. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan oleh kecermatan sekolah dalam mengalokasikan dana serta sejauh mana pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan.

Faktor berikutnya yang turut memengaruhi adalah partisipasi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menemukan bahwa sekolah-sekolah yang mampu melibatkan guru, siswa, komite sekolah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga serta merawat fasilitas pendidikan cenderung memiliki tingkat keberfungsian sarana prasarana yang lebih tinggi. Ini sejalan dengan hasil kajian oleh Nuraeni (2020) yang menegaskan bahwa pengelolaan fasilitas secara partisipatif mendorong terbentuknya rasa memiliki (*sense of belonging*) di kalangan warga sekolah. Misalnya, beberapa sekolah membentuk tim kecil yang bertugas untuk memantau kebersihan dan perawatan alat-alat pembelajaran atau menginisiasi kegiatan kerja bakti secara berkala. Dengan pendekatan partisipatif ini, beban pengelolaan tidak hanya ditanggung oleh pihak manajemen sekolah saja, melainkan dibagi secara kolektif.

Aspek lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga administrasi dan teknisi sarana prasarana. Di banyak sekolah, tidak tersedia tenaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset atau pemeliharaan fasilitas. Akibatnya, pencatatan inventaris sering kali tidak akurat, dan banyak barang rusak tidak segera diperbaiki atau diganti. Studi oleh Sudrajat (2018) juga menyoroti bahwa kurangnya pelatihan teknis bagi petugas sekolah mengakibatkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan alat dan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang memiliki SDM dengan pelatihan khusus cenderung lebih siap dalam mengelola fasilitas secara optimal, karena memahami prosedur standar pengelolaan, perawatan berkala, dan sistem pelaporan.

Terakhir, pengaruh lingkungan eksternal, seperti kondisi geografis, iklim, dan aksesibilitas, juga tidak dapat diabaikan. Sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau rawan bencana sering mengalami kerusakan sarana yang lebih cepat dan sulit mendapatkan bantuan logistik untuk perbaikan. Hal ini diperparah oleh keterbatasan jaringan penyedia barang dan jasa di wilayah tersebut. Sebagai contoh, sekolah yang berada di wilayah pesisir mengalami korosi cepat pada peralatan logam akibat paparan garam laut, sementara sekolah di daerah pegunungan kerap kesulitan mendapat material bangunan yang sesuai standar. Berdasarkan kajian dari Kementerian PUPR (2020), kondisi geografis yang ekstrem memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan dan pembangunan sarana pendidikan agar lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sangat tergantung pada kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan konteks lokal dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara kreatif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal

maupun eksternal. Faktor internal mencakup kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi manajerial tenaga kependidikan, dan partisipasi aktif warga sekolah dalam merawat fasilitas yang tersedia. Di sekolah yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan partisipasi kolektif yang tinggi, pengelolaan sarana prasarana cenderung berjalan lebih efektif, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, faktor eksternal seperti dukungan kebijakan pemerintah, alokasi anggaran, dan kondisi geografis sekolah juga memainkan peran penting. Sekolah yang berada di wilayah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap sumber daya mengalami tantangan yang lebih besar, baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan fasilitas. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan secara kontekstual, adaptif, dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan barang milik negara di sektor pendidikan. Jakarta: BPK RI.
- Handayani, R., & Sugiarto, T. (2019). Strategi pemeliharaan fasilitas pendidikan berbasis preventif di sekolah dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 101-115.
- Kemendikbudristek. (2022). Data pokok pendidikan (Dapodik) 2022: Kondisi ruang kelas dan fasilitas sekolah di Indonesia. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Laporan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Latifah, A., & Nugroho, Y. (2022). Ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan dan pengaruhnya terhadap keadilan sosial siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial*, 8(1), 33-45.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan melalui komite sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 67-78.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuraeni, S. (2020). Partisipasi warga sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(2), 112-123. <https://doi.org/10.17509/jap.v27i2.XXXXX>
- Nuraeni, I. (2020). Pengelolaan partisipatif dalam perawatan sarana prasarana sekolah. *Jurnal Ilmu Manajemen Pendidikan*, 10(3), 209-218.

- Prasetyo, A., & Raharjo, T. (2021). Digital divide dan tantangan implementasi pembelajaran berbasis TIK di sekolah menengah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 23(1), 57-70.
- Prasetyo, A. (2022). Kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan Dana BOS dan sarana prasarana. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 4(2), 44-53.
- Sari, D. P., & Kurniawan, B. (2020). Pengaruh keterbatasan fasilitas terhadap profesionalisme guru di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(2), 87-95.
- Suparno, P. (2021). Strategi adaptif pengelolaan sarana prasarana di sekolah pinggiran. *Jurnal Kependidikan Dasar*, 6(2), 99-110.
- Susanto, H. (2019). Budaya pemeliharaan fasilitas sekolah melalui peran serta warga sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 57-68.
- Suryana, D., & Widodo, A. (2020). Tantangan manajemen sarana prasarana di sekolah dasar negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(3), 23-34.
- Sudrajat, A. (2018). Kompetensi pengelola sarana prasarana dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 1-10.
- UNICEF. (2020). Water, sanitation and hygiene (WASH) in schools: Indonesia country report. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Utami, S. (2021). Sistem inventarisasi aset sekolah berbasis digital: Studi kasus di sekolah negeri kota Bandung. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2), 119-128.
- Wahyuni, S. (2022). Digitalisasi pengelolaan sarana prasarana sekolah: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Pendidikan*, 11(1), 45-56.
- World Bank. (2021). Spending better for education results in Indonesia: Public expenditure review. Washington, DC: The World Bank. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/>